



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA AYU NYOMAN CANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 674863

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/160 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.250.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.817.200.000

III. HUTANG Rp. 493.911.682

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.323.288.318

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.